

PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KETIMPANGAN PENDAPATAN, DAN KEMISKINAN: PENDEKATAN SPASIAL ANTAR PROVINSI DI INDONESIA

The Effect of Financial Inclusion on Economic Growth, Income Inequality and Poverty: A Spatial Approach across Provinces in Indonesia

Muhammad Riza Fakhrlrizqi*, Shafira Nuraulia**

*BPS Kabupaten Mandailing Natal, E-mail: riza.fakhrlrizqi @bps.go.id

**BPS Kabupaten Mandailing Natal, E-mail: shafira.nuraulia@bps.go.id

ABSTRAK

Pemerataan pembangunan merupakan salah satu prioritas pemerintah, tak terkecuali pembangunan sektor keuangan. Indonesia sudah mempersiapkan berbagai strategi dan perencanaan dalam meningkatkan inklusivitas keuangan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan antar individu dan antar daerah sebagai prioritas nasional. Provinsi Sumatera Utara menjadi perspektif utama yang dilihat dalam penelitian ini untuk mengukur sejauh mana inklusi keuangan dapat memengaruhi indikator prioritas. Penelitian ini menghitung indeks inklusi keuangan pada 34 provinsi dan melihat pengaruhnya terhadap tiga indikator prioritas tersebut secara spasial. Hasil analisis pada tingkat kepercayaan 10% ($\alpha=10\%$) menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh secara simultan terhadap ketiga indikator tersebut, namun perlu disertai pembangunan pada faktor sosial-ekonomi lainnya.

Kata kunci: inklusi, sektor keuangan, indeks, spasial

ABSTRACT

Equal development across sectors, including financial sector, is a government priority in Indonesia. Indonesia has prepared various strategies and plans to increase financial inclusiveness with the hope of encouraging economic growth, accelerating poverty reduction, and reducing disparities between individuals as a national priority. Sumatra Utara Province is the main perspective looked at in this research to measure how financial inclusion can influence priority indicators. This research calculates the financial inclusion index for 34 provinces and looks at its influence on the three priority indicators spatially. The results of the analysis at the 10% confidence level ($\alpha=10\%$) show that financial inclusion has a simultaneous effect on these three indicators, but needs to be accompanied by development of other socio-economic factors.

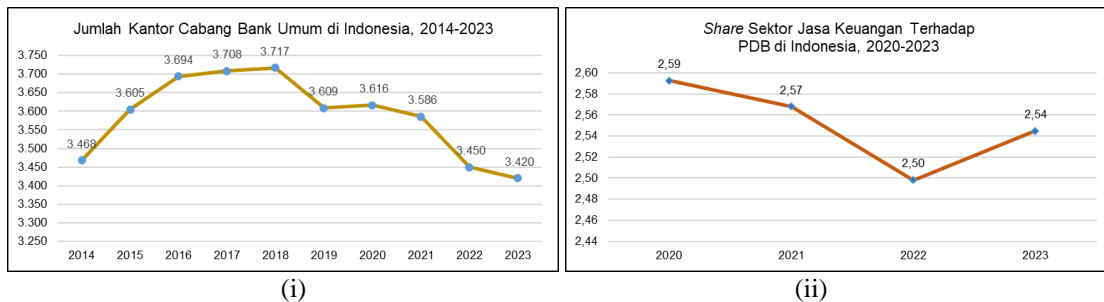
Keywords: inclusion, financial sector, index, spatial

I. PENDAHULUAN

Pemerataan pembangunan merupakan satu dari empat pilar visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Pembangunan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut yakni pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan, pemerataan, dan inklusivitas yang mencakup seluruh lapisan masyarakat. Salah

satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung target pembangunan yaitu dengan meningkatkan sektor keuangan sebagai agenda inti pembangunan (Bank Indonesia, 2014).

Dengan ditetapkannya UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan tanda keseriusan dan inisiatif pemerintah untuk mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Peraturan ini menyebutkan bahwa pembangunan sektor jasa keuangan juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan yang diharapkan dapat meminimalisir risiko sistematis, efektif, dan efisien.



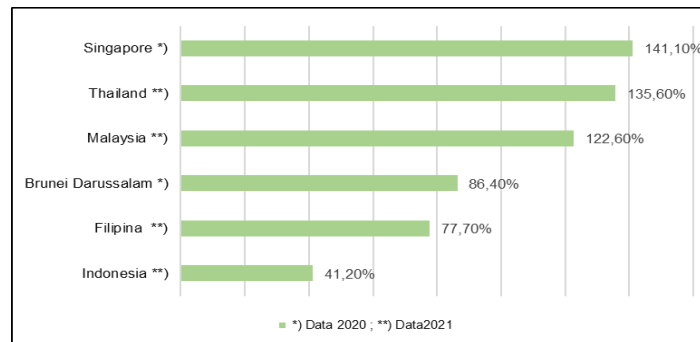
Gambar 1.i. Perkembangan Jumlah Kantor Cabang Bank Umum di Indonesia, 2014-2023
Gambar 1.ii. Perkembangan Share Sektor Jasa Keuangan Terhadap PDB di Indonesia, 2020-2023
 Sumber: BPS (2024)

Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang menguasai industri keuangan Indonesia. Besarnya aset perbankan menunjukkan perbankan merupakan lembaga keuangan yang mampu menarik konsumen lebih banyak dibandingkan dengan Lembaga keuangan lainnya (Ummah, Nuryartono, & Anggraeni, 2015). Masyarakat lebih memilih menyimpan asetnya di perbankan dalam bentuk dana pihak ketiga. Salah satu tolak ukur perkembangan perbankan dapat dilihat dari jumlah infrastruktur fisik yakni melalui kantor cabang yang didirikan di daerah-daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Pearce, 2011).

Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.i, jumlah kantor cabang bank umum di Indonesia secara bertahap mengalami peningkatan hingga tahun 2019, namun secara perlahan mengalami tren penurunan hingga tahun 2023. Fenomena ini terjadi karena semakin berkembangnya digitalisasi dan bank digital yang serba cepat dan mudah. Sebagaimana yang diutarakan Deputy Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital, Imansyah menyebutkan bahwa semakin maraknya transaksi bank melalui *mobile* berdampak bagi masyarakat yang semakin jarang ke kantor cabang bank. Bank melihat pendirian kantor cabang menjadi tidak efisien sehingga mereka mulai menutup sejumlah kantor dan mulai beralih ke pelayanan elektronik atau digital banking.

Maka dari itu, fenomena digitalisasi dan penurunan jumlah kantor cabang bank umum memang tidak mempengaruhi *share* sektor jasa keuangan terhadap PDB yang cenderung masih stabil pada kisaran 2,50-2,60 persen (Gambar 1.ii). Walaupun demikian, fenomena ini cukup

berdampak untuk perekonomian lokal pada segmen tertentu yang masih gagap teknologi sehingga membuat aksesibilitas layanan keuangan pada segmen ini semakin sulit serta mengurangi kesempatan UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang dibutuhkan untuk berkembang. Selain itu, penggunaan sektor jasa keuangan melalui perbankan masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga di ASEAN.



Gambar 2. *Share Deposit Bank Terhadap PDB di Indonesia, 2020-2021*
Sumber: *World Bank (2021)*

Pada Gambar 2, menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dari segi pemanfaatan sektor jasa keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketercakupannya akses layanan jasa keuangan Indonesia masih rendah. Maka dari itu, kebijakan dalam sektor keuangan harus menjadi perhatian Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan melalui peningkatan inklusi keuangan. Inklusi keuangan, yang biasanya didefinisikan sebagai penggunaan layanan keuangan formal, telah menjadi topik yang menarik perhatian para peneliti, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan sektor keuangan. Para pemimpin forum internasional seperti G20, APEC, OECD, dan ASEAN telah berkomitmen dan meningkatkan upaya untuk memenuhi tantangan dalam mempromosikan inklusi keuangan di seluruh dunia.

Sarma (2012) mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses ketersediaan, dan manfaat dari sistem keuangan formal bagi seluruh pelaku ekonomi. Dengan demikian, untuk mengukur tingkat inklusivitas keuangan suatu negara, dapat digunakan *Index of Financial Inclusion* atau Indeks Inklusi Keuangan (IIK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang salah satunya mengukur Indeks Literasi Keuangan pada tingkat nasional sampai tingkat provinsi. Akan tetapi, pada tahun 2024, hasil SNLIK yang tersedia hanya sampai tingkat nasional karena perubahan metodologi. Adapun penghitungan Indeks Inklusi Keuangan yang ditemukan oleh Sarma (2012) terdiri dari tiga dimensi, yaitu penetrasi perbankan (*accessibility*), ketersediaan layanan perbankan (*availability*), serta penggunaan (*usage*) (Sarma, 2012). Ketiga dimensi tersebut menjelaskan bahwa inklusivitas keuangan harus memiliki jumlah pengguna yang sangat banyak, menyediakan layanan yang mudah diakses, serta memberikan manfaat dari berbagai

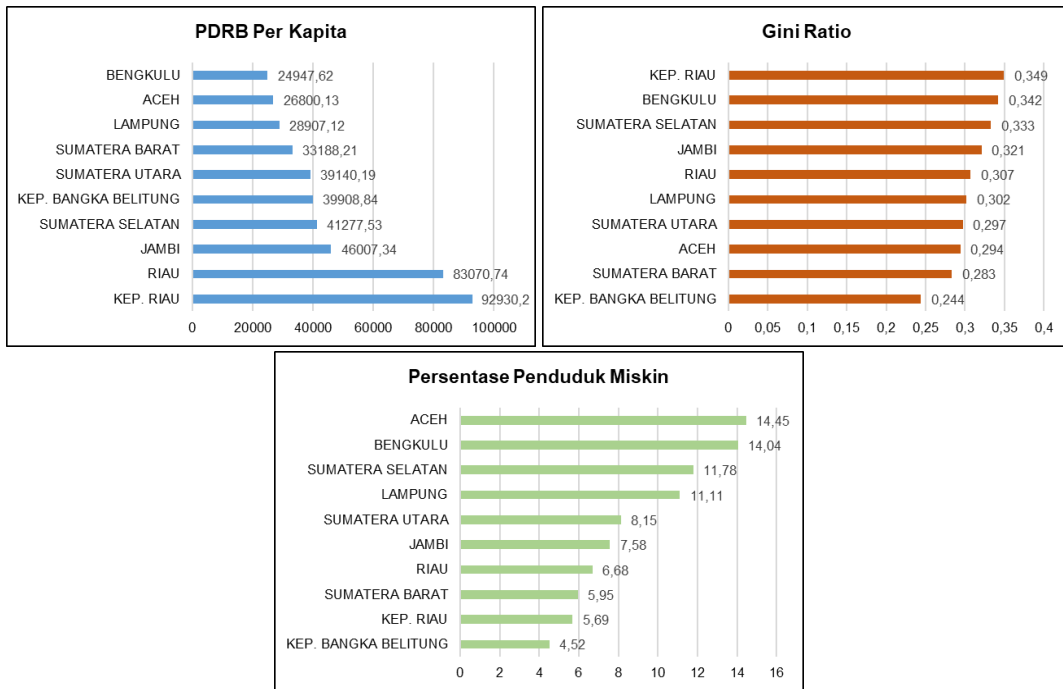
layanan yang disediakan.

Hal ini sejalan dengan inisiatif Pemerintah Indonesia yang melakukan penyusunan dokumen Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sejak tahun 2012. Implementasi SNKI dengan lembaga maupun instansi terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan akses masyarakat ke lembaga keuangan formal. Sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan SNKI, indikator kinerja utama keuangan inklusif terbagi ke dalam tiga jenis dimensi meliputi: (i) jangkauan akses, yaitu kemampuan untuk menggunakan layanan keuangan formal dalam hal keterjangkauan secara fisik dan biaya, (ii) penggunaan, yaitu penggunaan aktual atas layanan dan produk keuangan, dan (iii) kualitas, yaitu tingkat pemenuhan kebutuhan atas produk dan layanan keuangan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

SNKI merupakan strategi nasional yang memuat tujuan, cara mencapai tujuan, sasaran, dan target keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. SNKI berfungsi sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun kebijakan sektoral yang terkait dengan keuangan inklusif. Dengan demikian, pemerintah dapat menjadikan inklusi keuangan menjadi instrumen yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan penanggulangan kemiskinan.

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi dengan demografi terbesar di Pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki kota terbesar ketiga di Indonesia yakni Kota Medan. Kota Medan merupakan pusat perekonomian di Pulau Sumatera yang didukung dengan infrastruktur, demografi, dan letak geografis yang memadai. Hal ini membuat Provinsi Sumatera Utara menyumbang PDRB terbesar di Pulau Sumatera yakni berkisar pada 602 triliun (BPS, 2024). Dominasi Provinsi Sumatera Utara di Pulau Sumatera dari aspek demografi, geografis, dan ekonomi, tidak selaras dengan dominasi aspek lainnya yang juga merupakan indikator strategis.

Berdasarkan gambar di bawah, kita ketahui bahwa PDRB per kapita di Provinsi Sumatera Utara berada di peringkat lima terbawah di Pulau Sumatera yakni sebesar 39 juta per kapita. PDRB yang tinggi belum tentu sejalan dengan PDRB per kapita yang juga tinggi, hal ini menjadi indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara belum merata secara keseluruhan. Walaupun demikian, *gini ratio* yang menunjukkan ketimpangan pendapatan yang masih dikategorikan rendah menuju sedang sehingga perlu menjadi perhatian. Hal lain yang menjadi sorotan yaitu kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara yang masih cukup tinggi bahkan berada di posisi kelima sebagai provinsi dengan proporsi kemiskinan terbesar di Pulau Sumatera.



Gambar 3. PDRB Per Kapita, Gini Ratio, dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sumatera, 2023
 Sumber: BPS (2023), diolah

Di sisi lain, SNLIK yang diselenggarakan oleh OJK (2022) menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan di Provinsi Sumatera Utara sebesar 95,58 persen. Angka ini merupakan angka tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi DKI Jakarta. Capaian ini berbanding terbalik dengan PDRB per kapita, persentase penduduk miskin, dan *gini ratio* yang pencapaiannya belum maksimal jika dibandingkan nasional, bahkan Pulau Sumatera. Hal ini tidak selaras dengan rancangan strategi nasional mengenai keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Fenomena ini yang menjadi buah pikiran kami untuk melihat lebih jauh kondisi inklusi keuangan di Indonesia serta mengkaji secara khusus kondisi dan perspektif inklusi keuangan di Provinsi Sumatera Utara terhadap indikator sasaran yang meliputi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Selain itu, dari pandangan kami Inklusi keuangan sangat berkaitan erat dengan aksesibilitas dan keterjangkauan. Oleh karena itu, hal tersebut memungkinkan adanya efek spasial dalam pengaruh variabel berdasarkan keterkaitan wilayah sebagaimana hukum Tobler I yakni segala sesuatu saling berhubungan antar satu dengan lainnya namun sesuatu yang dekat memiliki pengaruh lebih besar daripada sesuatu yang jauh (Anselin & Rey, 2010) untuk melihat keterlibatan inklusi keuangan dan faktor sosial-ekonomi daerah terhadap indikator sasaran meliputi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, keuangan inklusif yakni situasi dimana setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk mengakses berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inklusi keuangan merupakan kajian yang menyeluruh dengan tujuan menghilangkan berbagai hambatan terkait pemanfaatan layanan jasa keuangan oleh masyarakat (Yanti, 2019). Oleh karena itu, inklusi keuangan memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memastikan setiap individu memiliki akses ke layanan keuangan sesuai kebutuhan. Penelitian ini menggunakan indikator dari tiga dimensi yakni dimensi penetrasi (*accessibility*), dimensi ketersediaan (*availability*), dan dimensi penggunaan (*usage*).

1. Dimensi penetrasi (*accessibility*)

Dimensi ini mengandung makna bahwa pengguna layanan keuangan harus sebanyak mungkin, yang dapat tergambarkan dengan besarnya proporsi orang dewasa yang memiliki rekening bank dan menyimpan uang di lembaga keuangan formal.

2. Dimensi ketersediaan (*availability*)

Dimensi ini mengandung arti kehadiran layanan lembaga keuangan untuk masyarakat, yang tergambarkan dari jumlah kantor layanan keuangan yang tersedia di suatu wilayah.

3. Dimensi penggunaan (*usage*)

Dimensi ini mengandung makna penggunaan rekening atau akun lembaga keuangan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan (Ika, 2021).

2.2 Inklusi Keuangan Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kapasitas suatu wilayah untuk memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan inklusi keuangan bermakna pada peningkatan akses keuangan yang dapat memperluas pilihan masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ekonomi. Pada akhirnya produktifitas meningkat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Anindynta, 2020). Pada penelitian yang dilakukan (Anindynta, 2020) memberikan kesimpulan bahwa inklusi keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Variabel ketersediaan dan akses dalam inklusi keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kim et al. (2018) juga menyimpulkan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota *Organization of Islamic Cooperation*.

2.3 Inklusi Keuangan Berpengaruh Terhadap Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk mengakses layanan dan peluang yang

dibutuhkan untuk hidup dengan layak. Dengan adanya inklusi keuangan diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap keuangan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta mengurangi angka kemiskinan (Demirguc-kunt & Klapper, 2012). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo, 2022) memberikan kesimpulan bahwa inklusi keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Rhamadani, 2021) memiliki kesimpulan bahwa inklusi keuangan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Variabel ketersediaan dan penggunaan memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia.

2.4 Inklusi Keuangan Berpengaruh Terhadap Tingkat Ketimpangan

Tingkat ketimpangan memiliki makna sejauh mana distribusi pendapatan masyarakat di suatu wilayah tidak merata. Hipotesis penurunan ketimpangan menyatakan bahwa ketika sektor keuangan suatu wilayah berkembang, kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap keuangan, dapat memperoleh akses keuangan dan dapat meningkatkan pendapatannya. Hal ini dapat mendorong penurunan tingkat ketimpangan (Tchamyu et al., 2019). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Amanda dan Marta, 2024) memiliki kesimpulan bahwa inklusi keuangan yang digambarkan dengan akses layanan jasa finansial berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan untuk menghitung Indeks Inklusi Keuangan (IIK) meliputi jumlah DPK per 1000 penduduk dewasa, jumlah kantor cabang per 100.000 penduduk dewasa serta rasio dari kredit dan deposit terhadap PDRB diperoleh dari OJK dan BPS. Penelitian ini mencakup 34 provinsi di Indonesia sebelum pemekaran dengan periode waktu yang digunakan adalah tahun 2023.

Tabel 1. Data, Deskripsi, dan Sumber dalam Penelitian

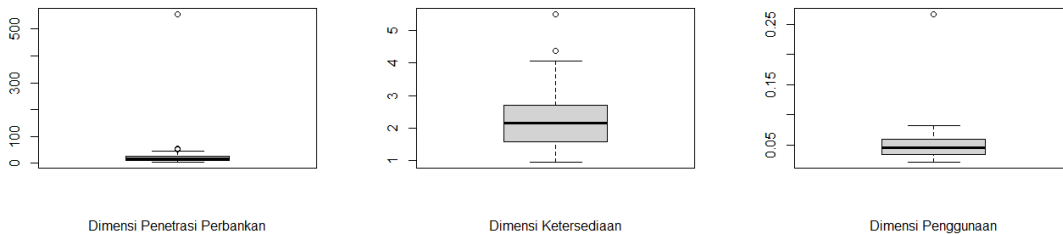
Data	Deskripsi	Sumber
Produk Domestik Regional Bruto	PDRB ADHK 2010 menurut pengeluaran dengan satuan miliar rupiah	BPS
Gini Ratio	Ukuran variabel ketimpangan pendapatan berdasarkan kurva Lorenz	BPS
Persentase Penduduk Miskin	Persentase penduduk yang dikategorikan miskin yakni penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan	BPS
Literasi Digital	Kemampuan menggunakan teknologi digital yang dinilai dari persentase penduduk yang pernah mengakses internet tiga bulan terakhir	BPS

Data	Deskripsi	Sumber
Indeks Inklusi Keuangan		
1) Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK)	Jumlah dana pada deposito, giro, dan tabungan yang terdaftar pada bank umum di suatu wilayah.	OJK-SPI
2) Jumlah Kantor Cabang Bank Umum	Jumlah keseluruhan kantor cabang bank umum yang berada di suatu wilayah pada periode tertentu.	OJK-SPI
3) Jumlah Deposito	Jumlah dana yang dihimpun dari DPK oleh bank yang melayani proses penghimpunan dana (penjumlahan rupiah dan valas)	OJK-SPI
4) Jumlah Kredit	Jumlah dana yang disalurkan DPK bukan bank oleh bank umum yang melayani proses berupa kredit.	OJK-SPI
5) Jumlah Penduduk Dewasa	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	BPS
Inflasi	Persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga	BPS
PMTB	Besarnya investasi fisik di suatu wilayah	BPS
Pengeluaran Pemerintah	Realisasi/penghitungan anggaran APBD provinsi pada setiap tahun anggaran	BPS

3.1 Penghitungan Indeks Inklusi Keuangan

Metode dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan dengan penghitungan Indeks Inklusi Keuangan di 34 provinsi Indonesia tahun 2023. Setelahnya, penelitian ini menyajikan peta tematik IIK, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan di Indonesia tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan IIK sebagai variabel independen. Indeks Inklusi Keuangan dibentuk dari tiga dimensi yaitu dimensi penetrasi, dimensi ketersediaan, dan dimensi penggunaan dimana masing-masing dimensi memiliki bobot (*weight*) yang sama. Pembobotan sama besar menjelaskan bahwa setiap dimensi memiliki peran yang sama dalam mengukur tingkat inklusi keuangan suatu wilayah (Sarma, 2012). Kemudian, batas bawah setiap dimensi ditetapkan sebesar nol (0). Sementara batas atasnya ditetapkan oleh nilai maksimum yang tergantung dari sebaran tiap-tiap dimensi, namun dengan syarat bukan merupakan pencilan.



Gambar 4. Boxplot sebaran setiap dimensi di 34 provinsi Indonesia
 Sumber: BPS (2023), diolah

Pada Gambar dapat dilihat bahwa nilai ketiga dimensi di Provinsi DKI Jakarta paling tinggi dan *outlier*. Dengan demikian, batas atas yang digunakan yaitu nilai maksimum dari sebaran ketiga

dimensi setelah nilai dari Provinsi DKI Jakarta. Maka, berikut bobot, batas bawah, dan batas atas dalam penghitungan IIK.

Tabel 2. Dimensi, Indikator, Bobot, Batas Bawah, dan Batas Atas

No.	Dimensi	Indikator	Bobot	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Penetrasi Perbankan	Jumlah Dana Pihak Ketiga per 1000 penduduk	1	0	56,592948
2.	Ketersediaan	Jumlah kantor cabang bank umum per 100.000 penduduk	1	0	4,3746707
3.	Penggunaan	Share deposito dan kredit terhadap PDRB (%)	1	0	81,86

Berdasarkan penentuan bobot, batas bawah, dan batas atas maka berikut cara pembentukan IIK setiap provinsi di Indonesia.

- (i) Menghitung nilai indeks masing-masing dimensi dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$d_i = w_i \frac{A_i - Minimum_i}{Maksimum_i - Minimum_i} \tag{1}$$

Keterangan:

- d_i : indeks dimensi ke- i
- w_i : besaran bobot untuk dimensi ke- i ($0 \leq w_i \leq 1$)
- A_i : nilai aktual untuk dimensi ke- i
- $Minimum_i$: batas bawah untuk dimensi ke- i
- $Maksimum_i$: batas atas untuk dimensi ke- i

- (ii) Menghitung X_1 (jarak *Euclidean* yang dinormalisasi antara X dan O) dan X_2 (*inverse* jarak *Euclidean* yang dinormalisasi antara X dan W). Dalam ruang tiga dimensi, titik $X = (d_1, d_2, d_3)$ mewakili pencapaian inklusi keuangan, titik $O = (0,0,0)$ mewakili titik pada situasi tidak ideal yang menunjukkan pencapaian inklusi keuangan yang paling rendah, serta titik $W = (w_1, w_2, w_3)$ mewakili titik pada situasi ideal yang menunjukkan pencapaian inklusi keuangan tertinggi pada semua dimensi.

$$X_1 = \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}} \tag{2}$$

$$X_2 = 1 - \frac{\sqrt{(w_1 - d_1)^2 + (w_2 - d_2)^2 + (w_3 - d_3)^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}} \tag{3}$$

Oleh karena besaran bobot yang digunakan untuk ketiga dimensi sama besar yaitu 1, maka

situasi ideal akan diwakili oleh titik $W = (1,1,1)$

- (iii) Menghitung IIK dengan menggunakan rata-rata sederhana dari X_1 (Persamaan 2) dan X_2 (Persamaan 3).

$$IIK = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$$

$$IIK = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2 + d_3^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}} + \left(1 - \frac{\sqrt{(w_1 - d_1)^2 + (w_2 - d_2)^2 + (w_3 - d_3)^2}}{\sqrt{w_1^2 + w_2^2 + w_3^2}} \right) \right) \quad (4)$$

IIK yang dihasilkan berada pada rentang 0 hingga 1 serta meningkat secara monoton, artinya nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi.

3.2 Autokorelasi Spasial

Autokorelasi yakni situasi di mana nilai suatu observasi pada suatu wilayah bergantung pada nilai observasi pada wilayah sekitarnya. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi spasial, maka dilakukan pengujian autokorelasi spasial global dengan menghitung nilai Global Moran's I. Adapun langkah pengujian autokorelasi spasial global yaitu:

- Hipotesis:
 - $H_0: I = 0$ (tidak terjadi autokorelasi spasial dalam data)
 - $H_1: I \neq 0$ (terjadi autokorelasi spasial dalam data)
- Statistik uji yang digunakan:

$$z \text{ value} = \frac{I - E(I)}{\sqrt{Var(I)}} \quad (5)$$

Keterangan:

- I : Statistik Moran I,
- $E(I)$: Nilai harapan statistik Moran I,
- $Var(I)$: Varian statistik Moran I

Keputusan : H_0 ditolak apabila nilai z-value lebih besar dari z-tabel atau pvalue $< \alpha$.

3.3 Analisis Spasial

Analisis inferensia yang digunakan yaitu analisis spasial untuk melihat pengaruh Indeks Inklusi Keuangan (IIK) dan faktor sosial-ekonomi lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan pada seluruh provinsi di Indonesia.. Penimbang spasial yang digunakan yakni penimbang *queen contiguity*. Terdapat dua model regresi spasial yang dapat dipilih dalam penelitian ini. Pemilihan model terbaik dengan Uji Lagrange Multiplier (Uji LM) dan Uji Robust Lagrange Multiplier (Uji RLM), yaitu:

1. Model SAR

$$PDRB_i = \beta_0 + \rho \sum W_{ij} PDRB_j + \beta_1 IIK_i + \beta_2 Internet_i + \beta_3 Inflasi_i + \beta_4 LnPMTB_i + \varepsilon_i \quad (6)$$

$$Kemiskinan_i = \beta_0 + \rho \sum W_{ij} Kemiskinan_j + \beta_1 IIK_i + \beta_2 PDRB_i + \beta_3 LnPP_i + \varepsilon_i \quad (7)$$

$$Gini_i = \beta_0 + \rho \sum W_{ij} Gini_j + \beta_1 IIK_i + \beta_2 Internet_i + \beta_3 LnPDRB_i + \varepsilon_i \quad (8)$$

2. Model SEM

$$PDRB_i = \beta_0 + \beta_1 IIK_i + \beta_2 Internet_i + \beta_3 Inflasi_i + \beta_4 LnPMTB_i + \mu_i \quad (9)$$

$$\mu_i = \lambda \sum W_{ij} u_j + \varepsilon_i \quad (10)$$

$$Kemiskinan_i = \beta_0 + \beta_1 IIK_i + \beta_2 PDRB_i + \beta_3 LnPP_i + \mu_i \quad (11)$$

$$\mu_i = \lambda \sum W_{ij} u_j + \varepsilon_i \quad (12)$$

$$Gini_i = \beta_0 + \beta_1 IIK_i + \beta_2 Internet_i + \beta_3 LnPDRB_i + \mu_i \quad (13)$$

$$\mu_i = \lambda \sum W_{ij} u_j + \varepsilon_i \quad (14)$$

Keterangan:

IIK_i : Indeks Inklusi Keuangan provinsi ke-i;

$Kemiskinan_i$: persentase penduduk miskin provinsi ke-i

$Gini_i$: koefisien gini provinsi ke-i

β_i : koefisien regresi variabel dependen

ρ : koefisien parameter spatial lag pada variabel dependen

λ : koefisien parameter spasial error pada error u

u : error yang diasumsikan mengandung autokorelasi

ε : error/galat

W_{ij} : matriks penimbang spasial

$Internet_i$: persentase penduduk yang pernah mengakses internet

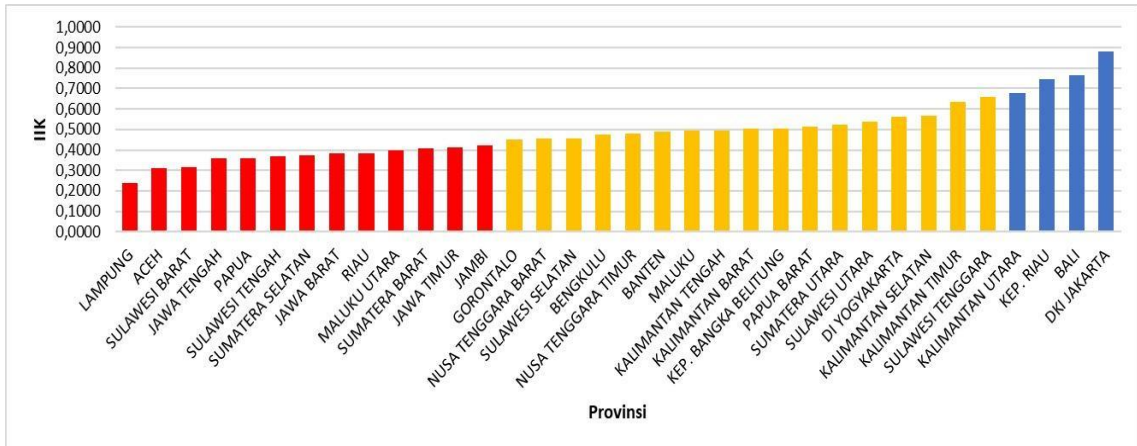
$Inflasi_i$: inflasi ke-i

$PMTB_i$: Pembentukan Modal Tetap Bruto provinsi ke-i

PP_i : Pengeluaran Pemerintah provinsi ke-i

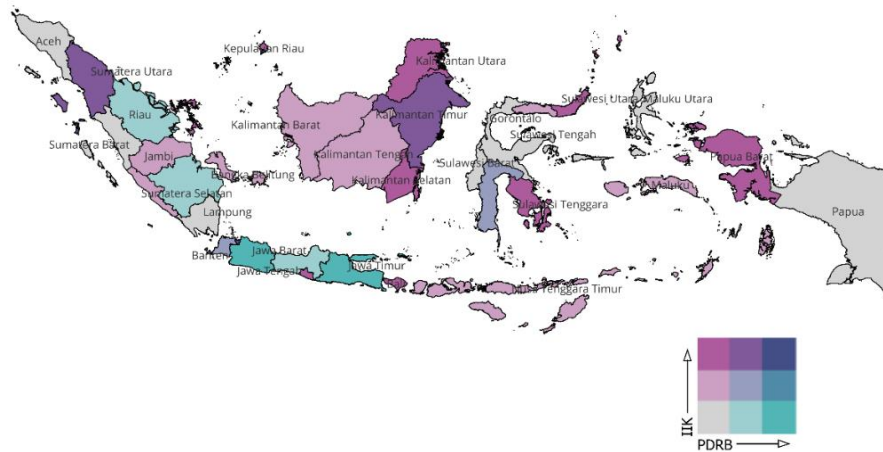
IV. HASIL, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif



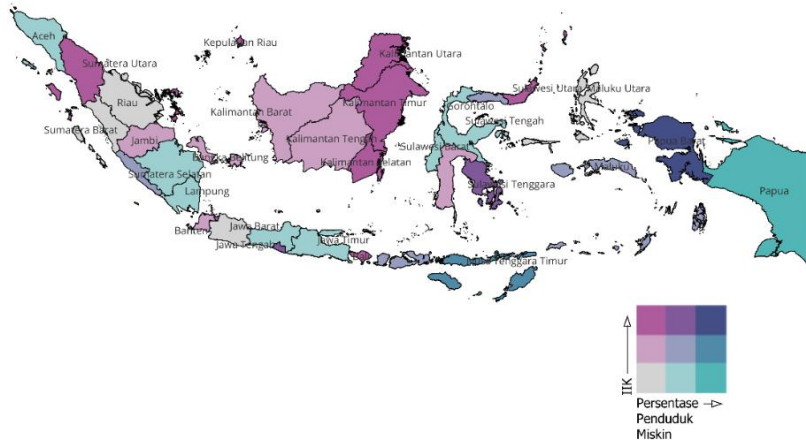
Gambar 5. Indeks Inklusi Keuangan pada 34 Provinsi di Indonesia, 2023
 Sumber: OJK dan BPS (2023), diolah

Pada grafik tersebut terlihat persebaran nilai Indeks Inklusi Keuangan (IJK) di Indonesia yang sebagian besar provinsi di Indonesia memiliki nilai IJK yang berkategori sedang yakni sebesar 0,45 hingga 0,66. Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai IJK yang berada pada kategori sedang yakni sebesar 0,52. Jika dibandingkan dengan provinsi lain, Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai IJK tertinggi yakni sebesar 0,88 dan Provinsi Lampung memiliki nilai IJK terendah yakni sebesar 0,24.



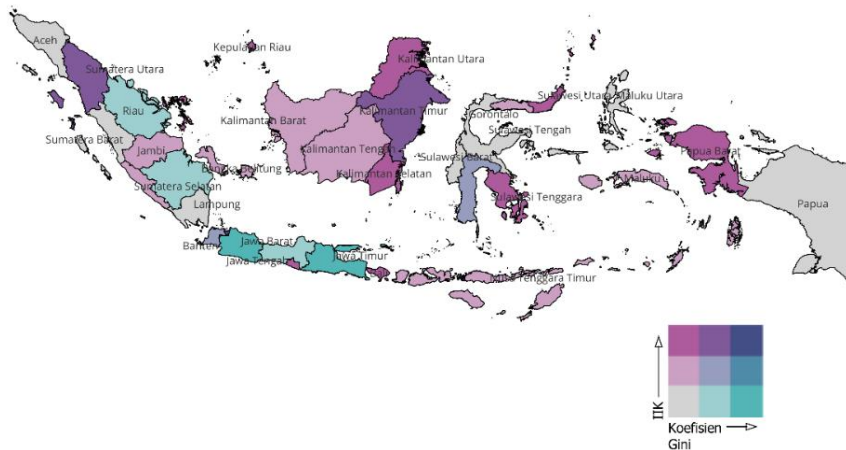
Gambar 6. Peta *Bivariat Choropleth* IJK dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), 2023
 Sumber: OJK dan BPS (2023), diolah

Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa beberapa daerah memiliki tingkat IJK yang berada pada kategori sedang hingga tinggi dan memiliki nilai PDRB yang cukup tinggi juga. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendapatan suatu daerah dan kondisi inklusi keuangannya. Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai indeks inklusi keuangan yang berada pada kategori tinggi dan tingkat pendapatan yang juga pada kategori yang sedang



Gambar 7. Peta *Bivariat Choropleth* IJK dan Tingkat Kemiskinan, 2023
 Sumber: OJK dan BPS (2023), diolah

Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa beberapa daerah memiliki tingkat IJK yang berada pada kategori sedang hingga tinggi dan memiliki nilai tingkat kemiskinan yang cenderung rendah. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara tingkat kemiskinan suatu daerah dan kondisi inklusi keuangannya. Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai indeks inklusi keuangan yang berada pada kategori tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah.



Gambar 8. Peta *Bivariat Choropleth* IJK dan Tingkat Ketimpangan, 2023
 Sumber: OJK dan BPS (2023), diolah

Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa beberapa daerah memiliki tingkat IJK yang berada pada kategori sedang hingga tinggi dan memiliki nilai tingkat ketimpangan yang cenderung rendah. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara tingkat ketimpangan suatu daerah dan kondisi inklusi keuangannya. Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai indeks inklusi keuangan yang berada pada kategori tinggi namun dengan tingkat ketimpangan yang tergolong sedang.

4.2 Autokorelasi Spasial

Autokorelasi merupakan situasi dimana nilai observasi suatu wilayah bergantung pada nilai

observasi wilayah-wilayah sekitarnya. Pengujian autokorelasi spasial global dilakukan untuk menguji apakah terjadinya autokorelasi spasial. Pengujian dilakukan dengan menghitung nilai statistik Moran's I. Pada tabel di atas menunjukkan nilai statistik Moran's I pada variabel pendapatan atau PDRB yakni sebesar 0,5829659, variabel persentase penduduk miskin sebesar 0,552861, dan variabel koefisien gini sebesar 0,58653. Sementara itu diperoleh nilai *p-value* pada variabel pendapatan atau PDRB yakni sebesar 0,0004576, variabel persentase penduduk miskin sebesar 0,001464, dan variabel koefisien gini sebesar 0,003733. Nilai *p-value* ketiganya kurang dari tingkat signifikansi 10 persen. Hal ini menandakan bahwa terjadinya autokorelasi spasial positif pada pendapatan suatu wilayah (PDRB), tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin), dan ketimpangan (Koefisien gini) provinsi di Indonesia. Artinya secara umum provinsi yang memiliki pendapatan suatu wilayah (PDRB), tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin), dan ketimpangan (Koefisien gini) yang tinggi cenderung dikelilingi oleh provinsi yang juga memiliki tingkat pendapatan suatu wilayah (PDRB), tingkat kemiskinan (persentase penduduk miskin), dan ketimpangan (koefisien gini) yang tinggi juga.

Tabel 3. Indeks Morans'I

Variabel	Morans'I	P-value
PDRB	0.5829659	0.0004576*
Persentase penduduk miskin	0.552861	0.001464*
Koefisien Gini	0.508653	0.003733*

Sumber: BPS (2023), diolah

4.3 Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penentuan model terbaik dapat dilakukan dengan melakukan pengujian Robust Lagrange Multiplier (Uji RLM). Berikut merupakan output hasil Uji RLM.

Tabel 4. Output Hasil Pengujian Ketergantungan Spasial Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

No	Uji Ketergantungan Spasial	Nilai	p-value
1	RLM-Lag	3.924477	0.04759*
2	RLM-Error	1.519208	0.21774

Keterangan: *) signifikan pada α sebesar 10 persen

Dari hasil perhitungan memperlihatkan bahwa uji RLM-Error tidak signifikan, sedangkan uji RLM-Lag signifikan. Artinya model spasial lag atau model *Spatial Autoregressive (SAR)* lebih tepat untuk digunakan. Berikut merupakan nilai estimasi yang terbentuk.

Tabel 5. Permodelan SAR dengan Pertumbuhan Ekonomi, Inklusi Keuangan, dan Faktor Sosial-Ekonomi

Variabel	Koefisien	Prob.
Intersep	-5973194,9	1,286e-13*
Rho	0,19795	0,098409*
IJK	226082,9	0,5680

Variabel	Koefisien	Prob.
Akses Internet	-1415,1	0,8064
Inflasi	1707036,5	0,1092
Ln(PMTB)	317225,1	8,218e-12*
Statistik Uji Simultan	2,9112	
Prob	0,087966*	

Keterangan: *) signifikan pada α sebesar 10 persen

Berikut merupakan estimasi model spatial lag untuk Provinsi Sumatera Utara:

$$\begin{aligned}
 \widehat{PDRB}_{Sumut} = & -5973194,9 + 0,0653235PDRB_{Aceh} + 0,0653235PDRB_{Sumbar} \\
 & + 0,0653235PDRB_{Riau} + 226082,9IIK_{Sumut} \\
 & - 1415,1Internet_{Sumut} + 1707036,5Inflasi_{Sumut} \\
 & + 317225,1LnPMTB_{Sumut}
 \end{aligned}
 \tag{15}$$

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh lag spasial PDRB Provinsi Sumatera Utara atau yang dilambangkan dengan rho dengan nilai koefisien sebesar 0,19795 yang terbagi dalam 3 wilayah tetangganya yakni Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan 1 milyar PDRB Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Riau meningkatkan PDRB Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,0653235 milyar dengan asumsi variabel lain konstan. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa inklusi keuangan, literasi digital, dan pertumbuhan investasi suatu daerah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Namun secara parsial, inklusi keuangan dan literasi digital tidak berpengaruh secara signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

4.4 Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Penentuan model terbaik dapat dilakukan dengan melakukan pengujian Lagrange Multiplier (Uji LM). Berikut merupakan output hasil Uji LM.

Tabel 6. Output Hasil Pengujian Ketergantungan Spasial Tingkat Kemiskinan

No	Uji Ketergantungan Spasial	Nilai	p-value
1	LM-Lag	3,58399	0,05834*
2	LM-Error	4,31421	0,03780*

Keterangan: *) signifikan pada α sebesar 10 persen

Dari hasil perhitungan tersebut, uji LM-Lag signifikan sehingga model spasial lag atau model *Spatial Autoregressive* (SAR) dapat digunakan. Berikut merupakan nilai estimasi yang terbentuk.

Tabel 7. Permodelan SAR dengan Tingkat Kemiskinan, Inklusi Keuangan, dan Faktor Sosial-Ekonomi

Variabel	Koefisien	Prob.
Intersep	-2,5104e+01	0,39972
Rho	0,24391	0,058232*

Variabel	Koefisien	Prob.
IJK	-1,0569e+01	0,04918*
PDRB	-5,1543e-06	0,07577*
Ln(PP)	2,4084e+00	0,18839
Statistik Uji Simultan	3,8387	
Prob	0,050082*	
Intersep	-2,5104e+01	

Keterangan: *) signifikan pada α sebesar 10 persen

Berikut merupakan estimasi model spasial lag untuk Provinsi Sumatera Utara:

$$\begin{aligned}
 \widehat{Kemiskinan}_{Sumut} &= -25,104 + 0,0804903Kemiskinan_{Aceh} \\
 &+ 0,0804903Kemiskinan_{Sumbat} + 0,0804903Kemiskinan_{Riau} \\
 &- 10,569IJK_{Sumut} - 0,0000051543PDRB_{Sumut} + 2,4084LnPP_{Sumut}
 \end{aligned}
 \tag{15}$$

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh lag spasial persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara atau yang dilambangkan dengan rho dengan nilai koefisien sebesar 0,24391 yang terbagi dalam tiga wilayah tetangganya yakni Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Sehingga dapat diartikan bahwa peningkatan satu persen penduduk miskin di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Riau meningkatkan persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,08 persen dengan asumsi variabel lain konstan. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa inklusi keuangan, PDRB, dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah suatu daerah secara simultan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial, inklusi keuangan dan PDRB berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Peningkatan IJK di Provinsi Sumatera Utara yakni satu satuan menurunkan persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara sebesar 10,569 persen. Sementara peningkatan PDRB di Provinsi Sumatera Utara satu satuan menurunkan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,0000051543 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya menurunkan tingkat kemiskinan dapat dilakukan dengan peningkatan inklusi keuangan.

4.5 Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Tingkat Ketimpangan

Penentuan model terbaik dapat dilakukan dengan melakukan pengujian Lagrange Multiplier (Uji LM). Berikut merupakan output hasil Uji LM.

Tabel 8. Output Hasil Pengujian Ketergantungan Spasial Tingkat Ketimpangan

No	Uji Ketergantungan Spasial	Nilai	p-value
1	LM-Lag	2,08831	0,14843
2	LM-Error	3,03970	0,08125*

Keterangan: *) signifikan pada α sebesar 10 persen

Dari hasil perhitungan memperlihatkan bahwa uji LM-Error signifikan, sedangkan uji LM-Lag tidak signifikan. Artinya *Spatial Error Model* (SEM) lebih tepat untuk digunakan. Berikut merupakan nilai estimasi yang terbentuk.

Tabel 9. Permodelan SEM dengan Tingkat Ketimpangan, Inklusi Keuangan, dan Faktor Sosial-Ekonomi

Variabel	Koefisien	Prob.
Intersep	0,23738816	0,006288*
Lambda	0,42772	0,027904*
IIK	0,07739318	0,188359
Akses Internet	-0,00032366	0,721398
Ln(PDRB)	0,00732907	0,277911
Statistik Uji Simultan	9,5896	
Prob	0,0019568*	
Intersep	0,23738816	

Keterangan: *) signifikan pada α sebesar 10 persen

Berikut merupakan estimasi model spatial lag untuk Provinsi Sumatera Utara:

$$\widehat{Gini}_{Sumut} = 0,23738816 + 0,07739318IIK_{Sumut} - 0,00032366Internet_{Sumut} + 0,00732907LnPDRB_{Sumut} + 0,1411476u_{Aceh} + 0,1411476u_{Sumbar} + 0,1411476u_{Riau} \quad (17)$$

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh error spasial dari provinsi lain yang dilambangkan lambda dengan nilai koefisien sebesar 0,24391 yang terbagi dalam 3 wilayah tetangganya yakni Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Maka, dapat diartikan bahwa *error* dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Riau meningkatkan ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara dengan asumsi variabel lain konstan. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa inklusi keuangan, literasi digital, dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara simultan berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan Provinsi Sumatera Utara. Namun, secara parsial inklusi keuangan, literasi digital, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan dalam peningkatan tingkat ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan dengan peningkatan inklusi keuangan dan literasi digital masyarakat yang diiringi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

4.6 Analisis dan Pembahasan

Inklusi keuangan terjadi ketika seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan dan sesuai kebutuhan (Sarma, 2012). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa inklusivitas keuangan belum menjangkau lapisan atau segmen masyarakat menengah ke bawah. Akses yang belum merata menyebabkan segmen ini tidak terbuka terhadap layanan

keuangan yang sebenarnya dapat membantu perekonomian. Dampaknya segmen masyarakat tersebut lebih tertarik pada layanan keuangan ilegal yang lebih terjangkau namun beresiko merugikan (Arvante, 2022).

Literasi digital menjadi indikator keterbukaan masyarakat terhadap teknologi serta kemampuan untuk berfikir kritis, kreatif, dan inovatif. Teknologi merupakan salah satu media yang dapat mempermudah masyarakat dalam menjangkau layanan keuangan atau dikenal dengan *fintech*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Saraswati (2022) yang menyatakan bahwa pembayaran *fintech* tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui layanan keuangan berbasis teknologi ini terutama pada masyarakat pedesaan. Saraswati (2022) berpendapat bahwa penggunaan *fintech* belum optimal untuk digunakan pelaku usaha di pedesaan yang sebagian besar berada pada sektor pertanian serta belum dapat mendorong produktivitas dari tenaga kerja di sektor tersebut. Maka, dapat disimpulkan upaya peningkatan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan dengan peningkatan inklusi keuangan dan literasi digital masyarakat Provinsi Sumatera Utara yang diiringi dengan peningkatan investasi.

Inklusi keuangan memberikan dampak dalam meningkatkan perekonomian sebuah keluarga untuk keluar dari kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan dengan Aprilliawan (2024) yang menyatakan aksesibilitas infrastruktur berupa jumlah bank dan keberadaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) memiliki pengaruh yang signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. Hasil ini memberi wawasan bahwa adanya infrastruktur layanan keuangan yang dapat meningkatkan inklusi keuangan pada wilayah-wilayah yang membutuhkan ternyata efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Inklusi keuangan tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam menurunkan tingkat ketimpangan di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini sejalan dengan Muslikah dan Utami (2020) yang menyatakan bahwa IIK tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena rendahnya akses keuangan pada masyarakat di berbagai daerah mengakibatkan ketimpangan ini masih terjadi. Akses keuangan masih hanya dimanfaatkan oleh masyarakat kalangan menengah ke atas yang berdampak pada perekonomian mereka yang semakin baik sehingga tingkat ketimpangan juga meningkat. Akselerasi peningkatan inklusi keuangan ini juga harus difokuskan terhadap masyarakat menengah ke bawah agar dampak yang dirasakan dapat menyeluruh serta menekan tingkat ketimpangan.

Literasi digital juga tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam menurunkan ketimpangan. Hasil ini mengindikasikan bahwa banyak masyarakat belum memiliki pemahaman baik dalam penggunaan teknologi digital. Hasil ini memberikan pengetahuan bahwa berbagai inovasi keuangan yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal tidak dimanfaatkan

dengan baik dan masyarakat lebih tertarik pada tawaran jasa keuangan yang berpotensi merugikan (Arvante, 2022). Dengan demikian, *gap* antara kesejahteraan masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah semakin jauh yang menyebabkan tingkat ketimpangan semakin tinggi.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi pada wilayah tetangga perlu dilakukan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat pendapatan Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut juga menandakan bahwa upaya peningkatan inklusi keuangan dan literasi keuangan perlu dilakukan pada wilayah-wilayah sekitar karena berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan Provinsi Sumatera Utara.

Inklusi keuangan secara empiris memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan inklusi keuangan perlu difokuskan terhadap wilayah-wilayah yang membutuhkan. Akses layanan keuangan pada wilayah membutuhkan sangat diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan serta mendorong ketimpangan yang akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan. Inovasi layanan keuangan yang lebih menjangkau masyarakat menengah ke bawah perlu ditingkatkan diiringi dengan inovasi keuangan yang sudah ada, karena inovasi keuangan yang ada hanya menjangkau masyarakat menengah ke atas. Selain itu, literasi digital sebagai indikator melek teknologi perlu ditingkatkan agar masyarakat memiliki pikiran kritis, kreatif, serta inovatif dalam pengelolaan keuangannya. Maka, peran pemerintah dapat berupa meningkatkan infrastruktur keuangan pada wilayah yang membutuhkan, meningkatkan pendidikan sebagai syarat mencapai literasi keuangan yang baik atau *well literated*, serta variabel lain seperti pembangunan investasi dan pengeluaran pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini melihat seberapa besar pengaruh inklusi keuangan terhadap indikator sasaran yang menjadi prioritas pemerintah yakni pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Selanjutnya, untuk analisis lebih detail menggunakan Provinsi Sumatera Utara menjadi perspektif yang dianalisa secara khusus berdasarkan fenomena yang terjadi.

Penelitian ini dilakukan dengan membuat Indeks Inklusi Keuangan (IIK) pada 34 provinsi di Indonesia. DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia memiliki indeks yang paling tinggi yang menandakan inklusivitas keuangan di provinsi ini sudah cukup baik. Di sisi lain, Provinsi Sumatera Utara menempati urutan ke-10 dengan IIK tertinggi dibandingkan 34 provinsi di Indonesia. Akan tetapi, angka ini masih berada di bawah rata-rata IIK dengan kategori tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa inklusivitas di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup baik, namun masih perlu peningkatan. Peningkatan ini bisa dilakukan dengan melakukan *benchmarking*

dengan provinsi lain yang memiliki IIK lebih tinggi antara lain yaitu Provinsi Kalimantan Timur yang juga menjadi provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Pulau Kalimantan. Selain itu, Provinsi Kepulauan Riau juga bisa menjadi contoh dan menjalin kolaborasi yang baik terutama dalam pengembangan inklusi keuangan di Pulau Sumatera. Selain itu, fenomena menurunnya jumlah kantor cabang bank perlu disertai dengan peningkatan cakupan dan pelayanan berbasis digital untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Penghitungan IIK selanjutnya dilakukan analisis untuk mengukur kontribusi inklusi keuangan terhadap indikator sasaran yang menjadi prioritas yakni pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Dengan menggunakan analisis spasial pada 34 provinsi di Indonesia didapatkan hasil bahwa inklusi keuangan, literasi digital, dan pertumbuhan investasi suatu daerah secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Inklusi keuangan, PDRB, dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah suatu daerah secara simultan berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara. Secara parsial, inklusi keuangan dan PDRB berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Inklusi keuangan, literasi digital, dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara simultan berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan inklusivitas keuangan harus disertai dengan perbaikan pada faktor sosial-ekonomi lainnya seperti literasi digital, inflasi, PMTB, dan pengeluaran pemerintah.

Hasil analisis spasial menunjukkan bahwa nilai indikator prioritas provinsi yang berbatasan langsung memengaruhi indikator prioritas di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini juga berkaitan dengan inklusi keuangan yang memang berkaitan erat dengan aksesibilitas dan keterjangkauan. Dengan demikian, perlu ada kolaborasi dan kerjasama berkaitan dengan pembangunan sektor keuangan dengan provinsi tetangga, yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Riau.

5.2 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut ini saran dan rekomendasi yang bisa kami berikan untuk beberapa pemerintah, sektor keuangan, dan penelitian selanjutnya dalam peningkatan inklusivitas keuangan serta keterkaitannya dengan kesejahteraan masyarakat.

Untuk Pemerintah dan Sektor Keuangan Secara Nasional

- 1) OJK dan sektor jasa keuangan perlu melakukan kajian dan evaluasi terkait penurunan kantor cabang bank umum, baik secara nasional maupun regional. Hal ini karena digitalisasi sektor jasa keuangan belum mencakup seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Sektor keuangan dapat melakukan inovasi layanan keuangan yang lebih menjangkau masyarakat menengah ke bawah seperti pinjaman berbunga rendah dan asuransi mikro

yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha menengah ke bawah.

- 3) Pemerintah dari berbagai sektor perlu meningkatkan infrastruktur keuangan pada wilayah yang membutuhkan berdasarkan hasil evaluasi dan kajian.
- 4) Pemerintah dan OJK perlu melakukan peningkatan pendidikan sebagai syarat mencapai literasi keuangan yang baik atau *well literated*.

Untuk Pemerintah dan Sektor Keuangan Secara Regional (Khusus Provinsi Sumatera Utara)

- 1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sektor jasa keuangan di Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan *benchmarking* terkait inklusi keuangan kepada Provinsi Kalimantan Timur (kontribusi ekonomi terbesar di Pulau Kalimantan) dan Provinsi Kepulauan Riau (kolaborasi peningkatan ekonomi regional di Pulau Sumatera).
- 2) Perlu ada kolaborasi dan kerjasama regional untuk membahas aksesibilitas dan pemanfaatan sektor keuangan dan jasa keuangan di daerah perbatasan antar regional tertentu.

Untuk Penelitian Selanjutnya

- 1) Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan melihat regional yang lebih dalam yakni tingkat kabupaten/kota
- 2) Dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan data yang lebih spesifik terkait inklusi keuangan digital, bank konvensional, dan bank syariah agar dapat melakukan pengkajian lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Shally Putri & Marta, Joan. (2024). Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Pada Negara Berkembang. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(2), 61–70. Retrieved from <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/article/view/10>
- Anindynta, F. A. (2020). Pengaruh Penerapan Inklusi Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(1), 153–164. <https://doi.org/10.22219/jie.v4i1.14900>.
- Anselin, L., & Rey, S. (2010). *Perspectives on Spatial Data Analysis*. Berlin: Heidelberg: Springer.
- Apriliawan, Y. (2024). Inklusi Keuangan dalam Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Kepulauan: Studi Kasus Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Archipelago*, 3(01), 127–137. <https://doi.org/10.69853/ja.v3i01.117>.

- Arvante, J. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1).
- Bank Indonesia. (2014). *Booklet Financial Inclusion*. Indonesia: bi.go.id.
- BPS. (2023). Tersedia pada bps.go.id
- BPS. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha 2019-2023. Medan: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Demirguc-kunt, A., & Klapper, L. (2012). *Measuring Financial Inclusion: The Global Financial Inclusion Index (Global Findex)*. *The World Bank Development, Policy Res (January 2011)*. Di, K., Jekulo, K., & Annur, R. A. (2013). *Mejobo Kabupaten Kudus*. 2(4), 409–426.
- Ika, Syahrir. (2021). *Kajian Inklusi Keuangan untuk Keadilan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*.
- Keuangan, O. J. (2022). *Booklet Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. www.ojk.go.id.
- Kim, D. W., Yu, J. S., & Hassan, M. K. (2018). *Financial inclusion and economic growth in OIC countries*. *Research in International Business and Finance*, 43, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.07.178>
- Muslikhah, A., & Utami, E. (2020). Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2012-2017. *Seminar Nasional Official Statistics, 2019* (pp. 738-748). <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.102>.
- Pearce, D. (2011). *Financial Inclusion in the Middle East and North Africa Analysis and Roadmap Recommendations*. *Policy Research Working Paper 5610, March*.
- Prasetyo, Natasya, et al. (2022). *Dampak Inflasi Keuangan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia : Studi Literatur*
- Rhamadani, Iwan. (2021). *Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan dan Kemiskinan di Indonesia*.
- Saraswati, B. (2022). *Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Fintech Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang di Asia*. Indonesia: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Sarma, M. (2012). *Index of Financial Inclusion - A measure of financial sector inclusiveness*. *Working Paper*, 07.
- Tchamyou, V. S., Erreygers, G., & Cassimon, D. (2019). *Inequality, ICT and financial access in Africa*. *Technological Forecasting and Social Change*, 139, 169–184.
- World Bank. 2021. *Global Financial Index*. Tersedia pada databank.worldbank.org
- Ummah, B. B., Nuryartono, N., & Anggraeni, L. (2015). Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 1-27.
- Yanti, W. I. P. (2019). Pengaruh Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara. 2(1).